

**PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE  
AUDIT TERHADAP PEMBENTUKAN *RISK  
MANAGEMENT COMMITTEE*  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Non Finansial di BEI)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**PARAMASTRI WULANDARI**

**NIM. C2C008105**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Paramastri Wulandari  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008105  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK  
KOMITE AUDIT TERHADAP  
PEMBENTUKAN RISK  
MANAGEMENT COMMITTEE (Studi  
Empiris Pada Perusahaan Non Finansial  
di BEI)**

Dosen Pembimbing : Wahyu Meiranto S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 30 Mei 2012

Dosen Pembimbing

Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt.  
NIP. 19760522 200312 1001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Paramastri Wulandari  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008105  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE  
AUDIT TERHADAP PEMBENTUKAN  
RISK MANAGEMENT COMMITTEE (Studi  
Empiris Pada Perusahaan Non Finansial di  
BEI)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal **8 Juni 2012**

Tim Penguji:

1. Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt. (.....)
2. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Paramastri Wulandari, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Pembentukan Risk Management Committee**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas, batal saya terima.

Semarang, 24 Mei 2012

Yang membuat pernyataan,

Paramastri Wulandari  
NIM. C2C008105

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of Audit Committee characteristics on the establishment of Risk Management Committee (RMC) in non financial firms. Audit Committees characteristics used in this study are independency, financially expertise, size, and diligence. This study also used firm size, leverage, business complexity, and auditor reputation as control variables.*

*Samples of this study were non financial firms listed on Indonesia Stock Exchange for the observation period of 2009 until 2010. Samples were collected by purposive sampling method and resulted 178 samples. This study used logistic regression for analyzing data.*

*The result showed that Audit Committee size and audit committee diligence affect the establishment of RMC. Firm size as control variable had positive and significant effect on the establishment of RMC.*

**Keywords:** *audit committee, corporate governance, risk management, internal control.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik Komite Audit terhadap pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) pada perusahaan non finansial. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi Komite Audit, keahlian keuangan Komite Audit, ukuran Komite Audit, dan ketekunan Komite Audit. Penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan, leverage, kompleksitas usaha, dan reputasi auditor sebagai variabel kontrol.

Sampel penelitian ini adalah perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode penelitian tahun 2009-2010. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 178 sampel. Penelitian ini menggunakan regresi logistik untuk menganalisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Komite Audit dan ketekunan Komite Audit berpengaruh terhadap pembentukan RMC pada perusahaan. Ukuran perusahaan, sebagai variabel kontrol, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

**Kata kunci:** komite audit, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, pengendalian internal.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"I don't depend on friends cause they come and go. My belief in myself. It's gonna carry me through.

That's why I'm learning"

(Charice – In This Song)

"Life begins at the end of your comfort zone"

(Anonim)

"Anda tidak selalu mendapat apa yang Anda inginkan karena di atas rencana Anda terdapat  
rencana Allah"

(Anonim)

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

- 🌸 Keluargaku yang selalu menjadi pendukungku
- 🌸 Teman-teman terdekatku
- 🌸 Teman-teman Akuntansi angkatan 2008

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PEMBENTUKAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE*”** dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Wahyu Meiranto, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, nasehat, dukungan, bimbingan, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Much. Syafrudin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Etna Nur Afri Yuyetta., S.E., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam studi.

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Ibunda Mardiyanti Pujiastuti, Ayah Wahyu Djalmono Putro, dan Eyang Putri atas cinta, doa dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga penulis dapat menjadi seseorang yang dapat membanggakan bagi kalian.
7. Dua jagoanku, Seno Adi Wicaksono dan Aryo Teja Sulaksono atas kasih sayang dan juga dukungannya kepada penulis. Semoga penulis dapat menjadi panutan bagi kalian.
8. Teman-teman terdekatku “Tensib” : Viva Yustitia, Diajeng Ch, Lala Martsila, Agatha Galuh, Ariati, Leony Lovancy, Allan Isana, M. Zalzabilani, dan Nadia Maya. Terima kasih untuk warna yang telah kalian torehkan dan juga terima kasih atas segala pelajaran hidup, persahabatan, dan dukungan untuk penulis.
9. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis saat mengerjakan skripsi, Hana Puji Lestari, Chandra Setya Kusuma, dan Leony Lovancy Trisanti. Terima kasih atas bantuan dan arahannya.
10. Teman satu bimbingan, Rizqi Zulmiati. Terima kasih telah menemani penulis selama beberapa kali bimbingan dan juga berbagi cerita serta dukungan.
11. Teman-teman angkatan 2008. Terima kasih telah atas dukungan dan bantuannya selama ini.
12. Teman-teman satu hobi, Riza NyitNyit, Dhiar, dan Sri Handayani. Terima kasih atas segala hiburan yang kalian berikan untuk penulis selama proses penulisan skripsi ini.

13. Teman-teman KKN Kecamatan Jumo, Temanggung, khususnya Desa Gunung Gempol : Dhiar, Yani, Heni, Dona, Aisela, Bisri, Widodo, Mas Dwiki, dan Mas Leo. Terima kasih telah menjadi teman baik dalam 35 hari hingga sekarang.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bawa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat digunakan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Semarang, 24 Mei 2012

Penulis,

Paramastri Wulandari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEUJUAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	10
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	12
2.1. Landasan Teori .....	12
2.1.1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	12

2.1.2.	Risiko .....	14
2.1.3.	Manajemen Risiko .....	15
2.1.4.	Corporate Governance .....	16
2.1.5.	<i>Risk Management Committee</i> .....	18
2.1.6.	Manfaat Keberadaan RMC pada Perusahaan .....	20
2.1.7.	<i>Risk Management Committee</i> pada Sektor Perbankan .....	21
2.1.8.	Komite Audit .....	23
2.1.9.	Karakteristik Komite Audit .....	25
2.1.9.1.	Independensi Komite Audit .....	26
2.1.9.2.	Keahlian Keuangan Komite Audit .....	26
2.1.9.3.	Ukuran Komite Audit .....	27
2.1.9.4.	Ketekunan Komite Audit .....	28
2.1.9.5.	Faktor Lain yang Mempengaruhi Pembentukan RMC .....	29
2.2.	Penelitian Terdahulu .....	32
2.3.	Kerangka Pemikiran .....	36
2.4.	Pengembangan Hipotesis .....	38
2.4.1.	Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	38
2.4.2.	Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	39
2.4.3.	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	40

2.4.4. Pengaruh Ketekunan Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	43
3.1.1. Variabel Penelitian .....	43
3.1.2. Definisi Operasional Variabel .....	44
3.1.2.1. <i>Risk Management Committee</i> .....	44
3.1.2.2. Independensi Komite Audit .....	44
3.1.2.3. Keahlian Keuangan Komite Audit .....	46
3.1.2.4. Ukuran Komite Audit .....	46
3.1.2.5. Ketekunan Komite Audit .....	47
3.1.2.6. Ukuran Perusahaan .....	47
3.1.2.7. Kompleksitas Usaha .....	48
3.1.2.8. <i>Leverage</i> .....	48
3.1.2.9. Reputasi Auditor .....	48
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian .....	49
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	50
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	50
3.5. Metode Analisis .....	51
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	51
3.5.2. Regresi Logistik .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	
4.1. Deskripsi Objek Penelitian .....	56

4.2.	Analisis Data .....	57
4.2.1.	Statistik Deskriptif .....	58
4.2.2.	Uji Kelayakan Model ( <i>Goodness of Fit Test</i> ) .....	61
4.2.3.	Uji Keseluruhan Model ( <i>Overall Fit Model Test</i> ) .....	62
4.2.4.	Koefisien Determinasi .....	63
4.2.5.	Tabel Klasifikasi .....	64
4.2.6.	Uji Multikolinearitas .....	66
4.3.	Uji Hipotesis .....	67
4.3.1.	Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	67
4.3.2.	Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	68
4.3.3.	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	68
4.3.4.	Pengaruh Ketekunan Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	68
4.4.	Pembahasan .....	69
4.4.1.	Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	69
4.4.2.	Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	70
4.4.3.	Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	71

4.4.4. Pengaruh Ketekunan Komite Audit terhadap Pembentukan RMC .....	72
4.4.5. Pengaruh Variabel-Variabel Lain terhadap Pembentukan RMC .....	73
BAB V PENUTUP .....	75
5.1. Kesimpulan .....	75
5.2. Keterbatasan dan Saran .....	76
5.2.1. Keterbatasan .....	76
5.2.2. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	34
Tabel 4.1	Proses Seleksi Sampel Dengan Kriteria .....	57
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi .....	58
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif .....	59
Tabel 4.4	Uji Kelayakan Model .....	62
Tabel 4.5	Perbandingan Nilai -2LL Awal dan -2LL Akhir.....	62
Tabel 4.6	Penurunan -2LL .....	63
Tabel 4.7	Koefisien Determinasi .....	64
Tabel 4.8	Tabel Klasifikasi .....	65
Tabel 4.9	Uji Multikolinearitas .....	66
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Hipotesis .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Manajemen Risiko Menurut Peraturan Bank Indonesia .....	23
Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Nama Perusahaan .....	81
Lampiran B	Output SPSS .....	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Peristiwa skandal akuntansi yang terjadi pada sejumlah perusahaan dan terjadinya krisis finansial di tahun 2008 telah menarik perhatian investor dan regulator. Tanpa memperhatikan apakah kejadian tersebut disebabkan oleh *excessive risk-taking* (Kashyap *et al.*, 2008) ataupun disebabkan oleh peningkatan level risiko yang dihadapi oleh perusahaan (Raber, 2003), kedua pendapat itu mengidentifikasi bahwa risiko merupakan penyebab utama krisis yang terjadi (Tao dan Hutchinson, 2011). Risiko menjadi bagian yang melekat pada strategi bisnis dan operasi sehari-hari yang pasti dihadapi oleh setiap perusahaan. Risiko muncul terlebih dari aktivitas perusahaan yang melakukan kegiatan transaksi ekonomi dengan banyak pihak (pemasok, kreditur, konsumen dan *stakeholder*).

Risiko dapat dikurangi melalui berbagai cara dan pengelolaan. Pengelolaan risiko ini disebut dengan manajemen risiko. Untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan, maka diperlukan sistem manajemen risiko yang efektif sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Subramaniam *et al.*, 2009). Oleh karena itu, demi berjalannya sistem manajemen risiko yang efektif, aspek pengawasan merupakan kunci yang penting (Andarini dan Januarti, 2010).

Pengawasan penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program penerapan manajemen risiko yang efektif merupakan peran dari

Dewan Komisaris (Krus dan Orowitz, 2009). Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. (Egon Zehnder International, 2000 dalam Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 2002).

Untuk meringankan beban tanggung jawabnya yang begitu luas, Dewan Komisaris dapat mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Tugas pengawasan manajemen risiko, pada sebagian besar perusahaan, diamanatkan kepada Komite Audit untuk mencapai manajemen risiko yang sesuai (Krus dan Orowitz, 2009). Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa salah satu peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah mengenai manajemen risiko dan kontrol, yaitu mengawasi proses manajemen risiko dan pengendalian perusahaan.

Namun, beberapa literatur menunjukkan adanya keraguan bahwa Komite Audit dapat menyediakan sebuah manajemen risiko yang efektif (Zaman, 2001 dalam Yatim, 2009; Krus dan Orowitz, 2009). Menurut Zaman (2001) dalam Yatim (2009) menunjukkan bahwa tidak masuk akal mengharapkan Komite Audit untuk melakukan kinerja dengan level yang lebih tinggi apabila dilihat dari kurangnya keahlian dan waktu. Padahal tugas pengawasan manajemen risiko

membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai struktur dan operasi perusahaan secara keseluruhan beserta risiko-risiko terkait. Krus dan Orowitz (2009) menyebutkan bahwa perusahaan memerlukan suatu komite yang memberikan perhatian penuh pada pengawasan risiko dan tidak berbagi fokus pada pemenuhan standar akuntansi, mengingat pentingnya pengawasan risiko dan adanya beragam risiko yang mungkin terjadi. Alasan inilah yang menjadi landasan beberapa perusahaan untuk menerapkan fungsi pengawasan tersebut pada suatu komite pengawas manajemen yang terpisah dari audit, yang secara khusus menangani peran pengawasan dan manajemen risiko perusahaan, atau disebut dengan *Risk Management Committee*.

*Risk Management Committee* (RMC) dalam beberapa literatur (Subramaniam *et al.*, 2009; Yatim, 2009; Blanchard dan Dionne, 2003) merupakan sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk khusus mengawasi pelaksanaan manajemen risiko perusahaan. Anggota RMC terdiri dari Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2006). Kegiatan pemantauan manajemen risiko yang dilakukan oleh RMC berfokus pada aspek pemantauan terhadap perubahan, pemantauan kinerja manajemen risiko, dan kemungkinan timbulnya risiko baru (KNKG, 2011).

Keberadaan RMC menjadi sangat penting sebagai *best practice* dalam penerapan *good corporate governance* (Fox *et al.*, 2011). Hal ini dibuktikan dengan survey *corporate governance* pada perusahaan public yang dilakukan oleh *National Association of Corporate Directors* (NACD) di tahun 2008. Hasil dari

survey tersebut menyatakan bahwa sebanyak 66,7% perusahaan menyerahkan pengawasan risiko kepada Komite Audit, 23,5% perusahaan pengawasan risikonya dilakukan sendiri oleh dewan (*full board*), dan sisanya menyerahkan pengawasan risiko pada RMC. Hasil dari survey tersebut juga menyatakan bahwa 79% perusahaan yang membentuk RMC menilai bahwa pengawasan risiko yang dilakukan oleh RMC lebih efektif daripada pengawasan risiko yang dilakukan oleh Komite Audit (Bates dan Leclerc, 2009).

*Risk Management Committee* juga dikenal di sektor Perbankan. RMC di sektor perbankan di Indonesia dikenal dengan nama Komite Manajemen Risiko (KMR). Konteks KMR dalam sektor perbankan sangat berbeda dengan RMC pada sektor non finansial. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003, disebutkan bahwa Komite Manajemen Risiko (KMR) merupakan komite yang berada di bawah Direktur, karena KMR bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus. RMC pada sektor non finansial memiliki pengertian yang sama dengan Komite Pemantau Risiko dalam sektor perbankan.

Menurut PBI No. 8/4/PBI/2006. Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang terdiri dari Komisaris Independen dan pihak-pihak independen. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab melakukan pemantauan dan memberikan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Pada perusahaan-perusahaan non finansial yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, seringkali

RMC disebut dengan Komite Manajemen Risiko. Namun, komite ini memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Komite Pemantau Risiko.

Kegiatan manajemen risiko perusahaan juga erat dipantau oleh Komite Audit. Tugas utama dari Komite Audit untuk mengawasi kinerja keuangan perusahaan dan memastikan kehandalan pelaporan keuangan (Yatim, 2009). RMC diperlukan untuk menilai kebijakan manajemen risiko perusahaan untuk menghasilkan informasi yang handal yang nantinya dapat bermanfaat bagi Komite Audit dalam mengawasi kinerja keuangan dan memastikan kehandalan pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dalam konteks praktik GCG, kontribusi efektivitas kinerja Komite Audit diharapkan berhubungan positif dengan pembentukan RMC.

Efektivitas kinerja dari Komite Audit dapat diukur melalui karakteristik-karakteristik yang dimiliki antara lain independensi dan ukuran dari Komite Audit, serta keahlian keuangan dan ketekunan yang dimiliki oleh anggota Komite Audit. Independensi Komite Audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota Komite Audit dengan aktivitas perusahaan. Ukuran Komite Audit berhubungan dengan jumlah anggota Komite Audit. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota Komite Audit berhubungan dengan pengetahuan keuangan dan akuntansi. Sedangkan, ketekunan Komite Audit diwujudkan melalui jumlah pertemuan Komite Audit dalam satu tahun. Melalui karakteristik Komite Audit yang baik diharapkan akan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pembentukan RMC.

Penelitian mengenai efektivitas Komite Audit telah banyak dilakukan di seluruh dunia. Namun, penelitian yang menjelaskan pengaruh karakteristik Komite Audit terhadap pembentukan RMC masih belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan RMC merupakan isu yang masih baru, terlebih lagi pembentukan RMC di perusahaan non finansial di Indonesia masih bersifat sukarela, sehingga bukti empiris tentang formasi dan struktur dari RMC masih terbatas (Subramaniam et al., 2009). Hal ini berbeda dengan perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dimana pembentukan RMC sudah dimandatkan. Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pembentukan RMC pada sektor non finansial, antara lain Subramaniam *et al.* (2009), Yatim (2009), Yatim (2010), dan Andarini dan Januarti (2010).

Subramaniam *et al.* (2009) melakukan penelitian tentang pembentukan *Risk Management Committee* (RMC) dan tipe dari RMC. Penelitian ini menemukan bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO independen dan ukuran dewan yang besar. CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC. CEO independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan pembentukan RMC yang terpisah dan kompleksitas berhubungan negatif dengan pembentukan RMC yang terpisah. Andarini dan Januarti (2010) melakukan penelitian yang serupa dengan Subramaniam *et al.* (2009), namun menemukan hasil yang berbeda. Penelitian tersebut menemukan bahwa ukuran dewan tidak memiliki pengaruh terhadap pembentukan RMC, namun ukuran perusahaan berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

Yatim (2009) meneliti tentang pembentukan RMC dengan karakteristik Komite Audit, yaitu independensi, keahlian keuangan, ukuran komite, dan ketekunan. Penelitian ini menemukan bahwa Komite Audit yang independen, mempunyai ukuran besar, dan memiliki ketekunan yang tinggi berhubungan positif dengan pembentukan RMC. Yatim (2010) juga meneliti tentang pembentukan RMC yang dihubungkan dengan karakteristik Dewan Komisaris. Penelitian ini menemukan bahwa semakin independen, ahli, dan rajin dewan komisaris akan cenderung untuk membentuk RMC. Selain itu hubungan antara ukuran perusahaan, kompleksitas operasi organisasi, dan penggunaan KAP yang tergabung dalam *Big Four* juga berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC. Penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian Subramaniam (2009).

Berdasarkan penelitian yang telah ada, maka penelitian ini mengacu pada penelitian Yatim (2009) yang menganalisis hubungan karakteristik Komite Audit terhadap pembentukan RMC pada perusahaan yang terdaftar di *Main Board* dan *Second Board* Bursa Malaysia. Sampel yang digunakan adalah 690 perusahaan non finansial yang terdaftar di tahun 2003. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa independensi, ukuran, dan ketekunan Komite Audit secara signifikan berhubungan positif dengan pembentukan RMC. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena manfaat adanya RMC dalam membantu pemenuhan tugas dari Komite Audit, sehingga perlu diteliti apakah pembentukannya dipengaruhi pula oleh Komite Audit. Hal tersebut dikarenakan, penelitian yang selama ini dilakukan hanya yang berkaitan dengan karakteristik Dewan Komisaris dan

karakteristik perusahaan (Subramaniam et al., 2009; Andarini dan Januarti, 2010; Yatim, 2010).

Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2010. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan non finansial karena penelitian ini memiliki syarat harus dilakukan pada industri yang mewajibkan adanya Komite Audit, tetapi tidak mewajibkan adanya RMC (Yatim, 2009). Pengawasan manajemen risiko pada perusahaan non finansial tidak sebesar pada perusahaan finansial. Oleh karena itu perusahaan non finansial dianggap lebih tepat untuk dijadikan sampel penelitian.

Dasar pemilihan tahun 2009 dan 2010 itu dipilih karena ingin mengetahui kebijakan manajemen risiko yang dibuat perusahaan pasca krisis finansial 2008. Pada krisis tersebut telah diidentifikasi penyebabnya adalah risiko (Tao dan Hutchinson, 2011). Di samping itu, tahun tersebut dipilih karena dianggap relevan dengan tahun dilakukannya penelitian karena menggambarkan profil perusahaan terkini. Karakteristik Komite Audit yang diteliti pada penelitian ini meliputi independensi, keahlian keuangan, ukuran, dan ketekunan. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, *leverage*, dan reputasi auditor.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PEMBENTUKAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE*”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah independensi Komite Audit berpengaruh terhadap pembentukan RMC?
2. Apakah keahlian keuangan Komite Audit berpengaruh terhadap pembentukan RMC?
3. Apakah ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap pembentukan RMC?
4. Apakah ketekunan Komite Audit berpengaruh terhadap pembentukan RMC?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh independensi komite audit terhadap pembentukan RMC
2. Untuk menganalisis pengaruh keahlian komite audit terhadap pembentukan RMC
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap pembentukan RMC

4. Untuk menganalisis pengaruh ketekunan komite audit terhadap pembentukan RMC

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh karakteristik Komite Audit terhadap pembentukan RMC pada perusahaan non finansial, sehingga diharapkan dapat menambah literatur mengenai *Corporate Governance* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas *corporate governance*, khususnya dengan membentuk RMC untuk meningkatkan kualitas pengawasan manajemen risiko.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan suatu pola penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari bab pertama hingga bab terakhir. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini mengemukakan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diusulkan.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan berbagai variabel penelitian dan definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang digunakan.

## BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan deksripsi uji penelitian, analisis data dan pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (pemilik) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agen). Agen yang bertindak sebagai pengelola dalam suatu perusahaan diberi kewenangan untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik. Dengan demikian, agen lebih banyak mempunyai informasi dibandingkan pemilik. Ketimpangan informasi ini biasa disebut sebagai asimetri informasi. Baik pemilik maupun agen diasumsikan mempunyai rasionalisasi ekonomi dan semata-mata mementingkan kepentingannya sendiri (Januarti, 2009), sehingga memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Adanya asimetri informasi ini menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan oleh kesulitan prinsipal untuk memonitor dan melakukan pengendalian terhadap tindakan-tindakan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah :

- a. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.
- b. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar

didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), sebuah masalah keagenan yang melekat dalam hubungan prinsipal dan agen dapat menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Biaya ini merupakan biaya pengorbanan agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis biaya yang menjadi komponen biaya keagenan. Pertama, biaya pengawasan (*monitoring cost*) yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk membatasi agen dari kepentingannya. Biaya ini dirancang untuk membatasi aktivitas-aktivitas yang menyimpang yang dilakukan oleh agen. Komponen biaya kedua ialah biaya yang dihabiskan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak sesuatu yang dapat merugikan prinsipal. Contoh biaya ini adalah insentif kepegawaian. Komponen biaya terakhir adalah kerugian residual (*residual loss*) yang merupakan nilai uang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan yang dialami oleh prinsipal akibat tindakan agen yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Biaya keagenan merupakan jumlah dari *monitoring cost*, biaya yang dihabiskan oleh agen, dan *residual loss* yang dialami prinsipal.

Biaya keagenan timbul karena adanya upaya pengawasan yang dilakukan oleh prinsipal (pemilik perusahaan) untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan dengan agen (pengelola perusahaan). Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Pengawasan merupakan salah satu komponen dalam GCG. Kualitas pengawasan yang baik dapat menurunkan perilaku oportunistik yang dilakukan oleh manajer sebagai agen.

Salah satu upaya untuk membentuk suatu pengawasan yang baik ialah adanya komite-komite pengawas untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan tahunan dan hal ini dapat membantu pekerjaan Dewan Komisaris yang bertugas menjaga dan memajukan kepentingan para pemegang saham (Alchain dan Demsetz 1972; Fama dan Jensen 1983; dalam Islam *et al.*, 2010).

### **2.1.2. Risiko**

Dunia selalu penuh dengan ketidakpastian, begitu juga dengan dunia usaha. Ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko (Djojosoedarso, 2003). Semakin besar ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan, semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, setiap perusahaan selalu berusaha untuk menanggulangnya, artinya berupaya meminimumkan ketidakpastian agar kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau paling tidak diminimumkan.

Menurut Gallati (2003), risiko merupakan *“a condition in which there exist a possibility of deviation from a desired outcome that is expected or hoped for”*. Djojosoedarso (2003), mengartikan risiko sebagai ketidakpastian atau kemungkinan terjadinya sesuatu, yang bila terjadi akan mengakibatkan kerugian. Menurut Alijoyo (2004), risiko merupakan *“a condition involving exposure to*

*events that would have an adverse impact on entity's objectives*". Dari ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan suatu kondisi yang menyimpang dari sasaran yang ingin dicapai, yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian, sehingga mempunyai dampak yang sifatnya merugikan perusahaan.

Pada perusahaan, risiko yang terjadi dikenal dengan nama risiko bisnis. Risiko bisnis terbagi menjadi tujuh kategori, yaitu risiko strategis, risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, risiko operasional, risiko komersial, risiko teknikal, dan risiko reputasi (Alijoyo, 2004).

### **2.1.3. Manajemen Risiko**

Risiko dapat dikurangi melalui berbagai cara dan pengelolaan. Penanggulangan risiko ini disebut dengan manajemen risiko. Kesadaran yang tinggi terhadap manajemen risiko sebagian besar sebagai akibat dari bencana yang dihadapi perusahaan dan kegagalan bisnis yang tidak diharapkan (Walker *et al.*, 2002 dalam Yatim, 2009).

Manajemen risiko menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO) dalam Alijoyo (2004) diartikan sebagai

*a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to be within ots risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.*

Kegiatan manajemen risiko mencakup merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program

penanggulangan risiko. Fungsi utama dari manajemen risiko adalah untuk menemukan dan mengevaluasi potensi kerugian (Djojosoedarso, 2003).

Manajemen risiko juga dapat dikategorikan sebagai sebuah strategi dalam fungsi manajemen secara umum untuk meningkatkan nilai (Suranarayana, 2003 dalam Gupta, 2011). Menurut Jorion (2001), kesuksesan sebuah organisasi bergantung pada manajemen risiko. Lam (2001) dalam Gupta (2011) juga mendukung pendapat bahwa manajemen risiko dapat mengurangi volatilitas laba, memaksimalkan nilai untuk pemegang saham, dan meningkatkan keamanan keuangan di dalam organisasi. Oleh karena itu, struktur manajemen risiko yang tepat membantu perusahaan dalam tiga hal penting, yaitu mengelola risiko dengan efektif, dan mengungkapkan hasil proses manajemen risiko perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Subramaniam *et al.*, 2009) dan meningkatkan nilai perusahaan.

Sistem manajemen risiko yang efektif sendiri merupakan suatu kekuatan perusahaan yang membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebagai usaha perlindungan reputasi perusahaan (Subramaniam, *et al.*, 2009). Oleh karena itu, aspek pengawasan merupakan kunci penting demi berjalannya sistem manajemen risiko perusahaan yang efektif (Andarini dan Januarti, 2010).

#### **2.1.4. Corporate Governance**

*Corporate Governance* telah menjadi pokok bahasan yang penting bagi para pelaku bisnis di seluruh dunia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan

tuntutan persaingan global menjadi salah satu faktor pendorong dilakukannya reformasi GCG (Alijoyo dan Zaini, 2004). Keberhasilan penegakan GCG sangat ditentukan oleh kualitas pimpinannya, yaitu Dewan Direksi sebagai pelaksana dan Dewan Komisaris sebagai pengawas. Dalam mekanisme *corporate governance*, Dewan Komisaris memiliki peranan dan tugas yang sangat penting. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.

Seperti yang dikutip dari FCGI (2002), Egon Zehnder International (2000) menyatakan bahwa Dewan Komisaris merupakan inti dari *Corporate Governance*, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Untuk meringankan beban tanggung jawabnya yang begitu luas, Dewan Komisaris dapat mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan

perhatian Dewan Komisaris pada bidang yang lebih khusus di dalam perusahaan atau cara pengelolaan yang baik oleh manajemen. Usulan dari komite-komite ini nantinya akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan.

#### **2.1.5. Risk Management Committee**

Seperti yang telah disebutkan dalam FCGI (2002), Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, untuk meringankan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite untuk membantunya. Komite bentukan Dewan Komisaris berfokus pada masalah-masalah tertentu. Saat ini, komite yang umumnya ada dalam perusahaan, yaitu Komite Kompensasi/Remunerasi, Komite Nominasi, dan Komite Audit.

Tugas pengawasan manajemen risiko, pada sebagian besar perusahaan, diamanatkan kepada Komite Audit untuk mencapai manajemen risiko yang sesuai (Krus dan Orowitz, 2009). Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa salah satu peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah mengenai manajemen risiko dan kontrol, yaitu mengawasi proses manajemen risiko dan pengendalian perusahaan.

Namun, beberapa literatur menunjukkan adanya keraguan bahwa Komite Audit dapat menyediakan sebuah manajemen risiko yang efektif (Zaman, 2001 dalam Yatim, 2009; Krus dan Orowitz, 2009). Menurut Zaman (2001) dalam Yatim (2009) menunjukkan bahwa tidak masuk akal mengharapkan Komite Audit untuk melakukan kinerja dengan level yang lebih tinggi apabila dilihat dari

kurangnya keahlian dan waktu. Padahal tugas pengawasan manajemen risiko membutuhkan pemahaman yang cukup mengenai struktur dan operasi perusahaan secara keseluruhan beserta risiko-risiko terkait. Krus dan Orowitz (2009) menyebutkan bahwa perusahaan memerlukan suatu komite yang memberikan perhatian penuh pada pengawasan risiko dan tidak berbagi fokus pada pemenuhan standar akuntansi, mengingat pentingnya pengawasan risiko dan adanya beragam risiko yang mungkin terjadi. Alasan inilah yang menjadi landasan beberapa perusahaan untuk menerapkan fungsi pengawasan tersebut pada suatu komite pengawas manajemen yang terpisah dari audit, yang secara khusus menangani peran pengawasan dan manajemen risiko perusahaan, atau disebut dengan *Risk Management Committee*.

*Risk Management Committee* (RMC) adalah organ Dewan Komisaris yang membantu melakukan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan (KNKG, 2011). Komite ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota RMC terdiri dari Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan (KNKG, 2006).

Menurut KNKG (2011), pemantauan pelaksanaan manajemen risiko mencakup hal-hal berikut:

1. Pemantauan terhadap perubahan: proses manajemen risiko hendaknya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses organisasi lainnya. Dengan demikian, dinamika manajemen risiko akan mengikuti dinamika

perubahan yang terjadi pada proses organisasi dan lingkungan organisasi itu sendiri.

2. Pemantauan kinerja manajemen risiko: pemantauan khususnya ditujukan pada risiko-risiko yang tinggi dan risiko-risiko yang kritis. Pemantauan difokuskan pada efektifitas pengendalian risikonya. Harus selalu dipantau pula bagaimana keandalan operasi pengendalian tersebut, bagaimanakah kemungkinan deteksi dini terhadap risiko tersebut, baik keandalan maupun kerentanannya, dan lain-lain.
3. Kemungkinan timbulnya risiko-risiko baru akibat dilaksanakannya suatu tindakan perlakuan risiko yang baru. Ini karena suatu risiko dapat mempunyai dampak menimbulkan risiko lainnya (*chain reaction*).

#### **2.1.6. Manfaat Keberadaan RMC pada Perusahaan**

Keberadaan RMC menjadi sangat penting sebagai *best practice* dalam penerapan *good corporate governance* (Fox *et al.*, 2011). Hal ini dibuktikan dengan survey *corporate governance* pada perusahaan public yang dilakukan oleh *National Association of Corporate Directors* (NACD) di tahun 2008. Hasil dari survey tersebut menyatakan bahwa sebanyak 66,7% perusahaan menyerahkan pengawasan risiko kepada Komite Audit, 23,5% perusahaan pengawasan risikonya dilakukan sendiri oleh dewan (*full board*), dan sisanya menyerahkan pengawasan risiko pada RMC. Hasil dari survey tersebut juga menyatakan bahwa 79% perusahaan yang membentuk RMC menilai bahwa pengawasan risiko yang

dilakukan oleh RMC lebih efektif daripada pengawasan risiko yang dilakukan oleh Komite Audit (Bates dan Leclerc, 2009).

Menurut Bates dan Leclerc (2009), RMC memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu RMC meringankan tugas Komite Audit, yaitu dalam hal pengawasan risiko yang lebih terfokus dan lebih luas. RMC juga membantu Komite Audit dalam memastikan kehandalan laporan keuangan, yaitu dengan melakukan tinjauan periodik pada manajemen risiko perusahaan, sistem mitigasi, serta tindakan manajerial yang digunakan untuk mengelola risiko sangat penting dalam pemenuhan tugas Komite Audit (Yatim, 2009).

#### **2.1.7. *Risk Management Committee* Pada Sektor Perbankan**

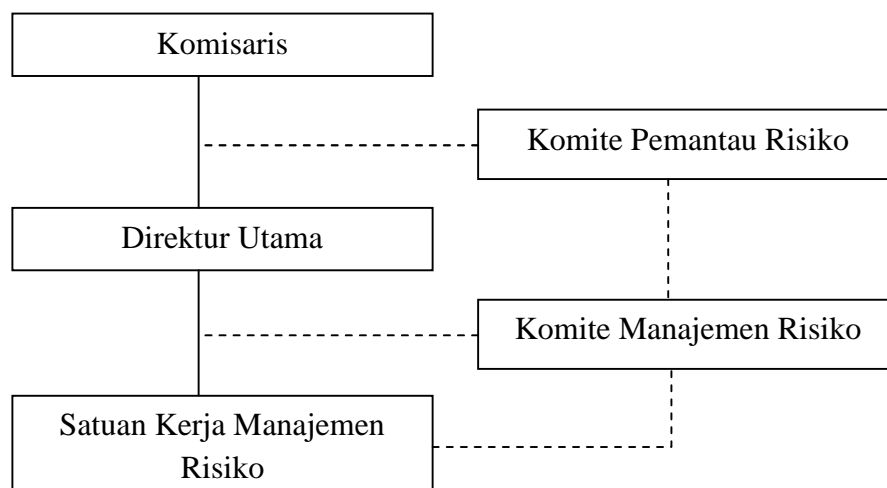
*Risk Management Committee* di sektor perbankan di Indonesia dikenal dengan nama Komite Manajemen Risiko. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Komite Manajemen Risiko (KMR) ialah komite yang terdiri dari mayoritas Direktur dan pejabat eksekutif terkait, bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko dan juga bertanggung jawab dalam perbaikan dan penyempurnaan Manajemen Risiko berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, KMR juga bertanggung jawab dalam penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. KMR merupakan komite yang berada di bawah Direktur, karena KMR bertanggung jawab kepada Direktur Utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus.

RMC yang terdapat di sektor non finansial, seperti yang telah disebutkan dalam beberapa literatur (Krus dan Orowitz, 2009; Subramaniam *et al*, 2009; Yatim, 2009), merupakan organ Dewan Komisaris yang membantu melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan penerapan manajemen risiko pada perusahaan (KNKG, 2011). Komite ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota RMC terdiri dari Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan (KNKG, 2006).

RMC pada sektor non finansial memiliki pengertian yang sama dengan Komite Pemantau Risiko dalam sektor perbankan. Menurut PBI No. 8/4/PBI/2006. Komite Pemantau Risiko merupakan komite yang terdiri dari Komisaris Independen dan pihak-pihak independen. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab melakukan pemantauan dan memberikan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko juga bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang ada di dalam bank umum. Pada perusahaan-perusahaan non finansial yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, seringkali RMC disebut dengan Komite Manajemen Risiko. Namun, komite ini memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Komite Pemantau Risiko.

**Gambar 2.1**

**Struktur Manajemen Risiko Menurut Peraturan Bank Indonesia**



*Sumber: Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan No. 5/8/PBI/2003*

### 2.1.8. Komite Audit

Dalam rangka pelaksanaan GCG, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai pembentukan Komite Audit yang ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004. Peraturan ini menyebutkan bahwa Bursa Efek Indonesia mewajibkan perusahaan yang terdaftar memiliki Komite Audit. Hal ini senada dengan rekomendasi dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dalam artikel FCGI (2002) bahwa setiap perusahaan publik harus memiliki Komite Audit yang diatur sebagai komite tetap.

Pengertian Komite Audit menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang

beranggotakan pihak-pihak independen yang bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Komite Audit bertugas memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Dewan Komisaris, antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

### **2.1.9. Karakteristik Komite Audit**

Komite Audit mempunyai peran yang cukup vital dalam proses terlaksananya suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Tentunya agar Komite Audit dapat menjalankan tugasnya dengan benar dan efektif, maka diperlukan kualifikasi-kualifikasi khusus yang memadai agar maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Wardhani dan Joseph, 2010). Kualifikasi atau karakteristik yang baik dari Komite Audit ini diharapkan dapat menjadi suatu dasar kepercayaan terhadap para anggota Komite Audit untuk nantinya dapat bekerja maksimal dan sebaik mungkin.

Komite Audit yang memiliki karakteristik yang baik diharapkan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas pengawasan dengan baik dengan membuat rekomendasi-rekomendasi yang baik pula untuk perusahaan. Rekomendasi yang baik itu salah satu contohnya ialah dengan pembentukan RMC, karena RMC bermanfaat bagi pemenuhan tugas Komite Audit.

Karakteristik Komite Audit yang digunakan antara lain independensi dan ukuran dari Komite Audit, serta keahlian keuangan dan ketekunan yang dimiliki oleh anggota Komite Audit. Empat karakter ini diidentifikasi oleh Xie *et al.*, (2003). Independensi Komite Audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota Komite Audit dengan aktivitas perusahaan. Ukuran Komite Audit berhubungan dengan jumlah anggota Komite Audit. Keahlian keuangan yang dimiliki oleh anggota Komite Audit berhubungan dengan pengetahuan keuangan dan akuntansi. Sedangkan, ketekunan Komite Audit diwujudkan melalui frekuensi pertemuan Komite Audit dalam satu tahun. Melalui

karakteristik Komite Audit yang baik diharapkan akan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan pembentukan RMC.

#### **2.1.9.1. Independensi Komite Audit**

Dalam Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 dinyatakan bahwa kedudukan Komite Audit berada di bawah Dewan Komisaris dan salah seorang Komisaris Independen sekaligus menjadi ketua Komite Audit. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Anggota Komite Audit dipersyaratkan berasal dari pihak yang tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).

#### **2.1.9.2. Keahlian keuangan Komite Audit**

Keahlian keuangan Komite Audit adalah karakteristik penting untuk menilai efektivitas operasi dari komite. Dionne dan Triki (2005) mendefinisikan anggota yang berpengetahuan keuangan ialah anggota yang pada saat ini maupun sebelumnya pernah mempunyai posisi atau melakukan aktivitas yang berkaitan

dengan keuangan, dan anggota yang mempunyai latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi. Pemahaman tentang akuntansi dan keuangan sangat membantu tugas Komite Audit dalam menguji dan menganalisis informasi keuangan perusahaan. Latar belakang pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan bahwa Komite Audit dapat bekerja secara efektif (Rahmat *et al.*, 2009).

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota Komite Audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan. Berdasarkan pedoman *corporate governance* FCGI (2002), anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan keuangan, serta memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Setidaknya satu anggota Komite Audit harus pula mempunyai pengertian yang baik tentang pelaporan keuangan.

### **2.1.9.3. Ukuran Komite Audit**

Jumlah anggota Komite Audit memiliki kaitan yang erat dengan seberapa banyak sumber daya yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Komite Audit haruslah memiliki jumlah yang memadai untuk mengemban tanggung jawab pengendalian dan pengawasan aktivitas manajemen puncak (Abawayya, 2010). Ukuran komite yang lebih besar menyebabkan adanya pertukaran pengetahuan dan informasi (Tao dan Hutchinson, 2011).

Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan besar-kecilnya dengan perusahaan dan tanggung jawab. Menurut Carcello *et al.*, (2008) rantang yang efektif adalah sebesar 6 - 9 orang, karena Komite Audit yang terlalu kecil akan mengalami kesulitan dalam pendistribusian kerja. Namun, biasanya 3 - 5 anggota merupakan jumlah yang cukup ideal (FCGI, 2002; KNKG, 2006). Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004) juga menyatakan bahwa perusahaan *go public* wajib untuk memiliki Komite Audit dengan jumlah minimal tiga orang. Jumlah tersebut mayoritas harus bersifat independen.

#### **2.1.9.4. Ketekunan Komite Audit**

Efektivitas Komite Audit dalam pemenuhan tanggung jawabnya sebagai pengawas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal membutuhkan pertemuan yang teratur (Vafeas, 1999 dalam Rahmat *et al.*, 2009). Pertemuan rutin memberikan kesempatan pada anggota komite untuk saling bertukar pengetahuan. Pertemuan rutin juga meningkatkan komunikasi yang baik di dalam komite dan dapat membantu perusahaan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi tingkat risiko (Tao dan Hutchinson, 2011). Lipton dan Lorsch (1992) dalam Tao dan Hutchinson (2011) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan yang lebih sering memungkinkan masalah potensial diidentifikasi, didiskusikan, dan dihindari. Oleh karena itu, frekuensi pertemuan komite diharapkan menjadi sebuah faktor penting dalam menentukan efektivitas pemantauan perusahaan.

Artikel FCGI (2002) menyebutkan bahwa Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan. Treadway Commission (1987) dalam Sori et al., (2007) juga menyatakan Komite Audit sebaiknya bertemu minimal empat kali dalam satu tahun.

#### **2.1.10. Faktor Lain Yang Mempengaruhi Pembentukan RMC**

Pembentukan RMC pada suatu perusahaan tidak lepas dari pengaruh karakteristik yang terdapat dalam perusahaan, seperti ukuran perusahaan, kompleksitas usaha, *leverage*, dan reputasi auditor.

##### **2.1.10.1. Ukuran Perusahaan**

Wallace dan Kreutsfeldt (1991) dalam Yatim (2009) mengidentifikasi ukuran perusahaan sebagai salah satu dari karakteristik perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan untuk membentuk suatu mekanisme pengendalian internal. Peningkatan ukuran perusahaan cenderung membuat pemantauan menjadi lebih luas dan meningkatkan kebutuhan mekanisme pengendalian perusahaan (Tao dan Hutchinson, 2011). Oleh karena itu, perusahaan akan membentuk komite khusus untuk menangani masalah tersebut, yaitu RMC.

#### **2.1.10.2. Kompleksitas Usaha**

Kompleksitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Sebuah perusahaan yang memiliki segmen bisnis yang luas membutuhkan strategi pemasaran yang lebih banyak dan luas. Kompleksitas perusahaan dapat meningkatkan risiko operasional dan teknologi. Kompleksitas operasi perusahaan dan desentralisasi segmen bisnis membutuhkan mekanisme manajemen risiko yang lebih efektif, sehingga manajemen akan mendapat keuntungan dari detail risiko yang jelas dan *comparable* yang dihadapi oleh divisi atau unit bisnis yang berbeda (Boswell, 2001 dalam Yatim, 2009). Keadaan ini mendorong organisasi untuk mendirikan RMC. RMC dipandang sebagai sebuah komite yang berada di bawah dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan manajemen risiko yang disebabkan adanya kompleksitas organisasi.

#### **2.1.10.3. Leverage**

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh liabilitas. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung untuk memiliki biaya agensi yang tinggi pula, dalam hal ini dapat menimbulkan tingginya risiko keuangan yang harus dihadapi. Perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung untuk memiliki risiko *going concern* yang tinggi (Subramaniam *et al.*, 2009). Oleh karena itu, diperlukan suatu pengendalian internal yang baik, terkait dengan fungsi pengawasan.

Perusahaan dengan leverage tinggi akan memiliki tuntutan kuat untuk membentuk suatu komite dengan tujuan mengawasi risiko *going concern* tersebut. Penelitian Chen *et al.* (2009) menemukan bahwa tingginya level liabilitas cenderung membuat perusahaan membentuk komite (yaitu, Komite Audit). Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pembentukan suatu komite terjadi saat perusahaan memiliki tingkat *leverage* yang tinggi. Jadi, tingginya tingkat *leverage* perusahaan cenderung membuat perusahaan membentuk RMC (Andarini, 2010).

#### **2.1.10.4. Reputasi Auditor**

Auditor merupakan profesi yang diperlukan untuk memberikan penilaian atas kewajaran laporan keuangan. Informasi tersebut berguna bagi para *stakeholders* untuk melakukan keputusan yang terkait dengan perusahaan. Penyediaan kualitas audit yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

KNKG (2006) menyebutkan bahwa salah satu wewenang Komite Audit adalah melakukan penunjukan terhadap auditor eksternal untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan. Komite Audit yang kompeten akan cenderung menunjuk auditor eksternal yang bereputasi baik, seperti KAP yang tergabung dalam *Big Four*. De Angelo dalam Kartika (2009) berpendapat bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bereputasi baik akan menyediakan kualitas layanan yang lebih baik dibandingkan dengan KAP lainnya. KAP yang bereputasi tinggi akan melindungi investasinya yang berupa reputasi. Auditor *Big Four*, dalam hal ini yang memiliki reputasi baik,

umumnya akan memberikan panduan kepada kliennya mengenai praktik *corporate governance* terbaik (Chen, *et al.*, 2009).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pembentukan RMC di dalam suatu perusahaan masih belum banyak dilakukan. Hal ini dikarenakan RMC merupakan isu yang masih baru terlebih lagi pembentukan RMC di perusahaan non finansial di Indonesia masih bersifat sukarela, berbeda dengan perusahaan yang bergerak di sektor perbankan dimana pembentukan RMC sudah dimandatkan. Penelitian terdahulu yang meneliti tentang hal yang berkaitan dengan komite audit dan juga pembentukan komite, antara lain Rahmat *et al.* (2009), Chen *et al.* (2009), Yatim (2009), Subramaniam *et al.* (2009), Yatim (2010), dan Andarini dan Januarti (2010).

1. Penelitian Rahmat *et al.* (2009) meneliti hubungan karakteristik Komite Audit dengan *financial distressed*. Karakteristik Komite Audit yang digunakan, yaitu ukuran, komposisi direksi non eksekutif, frekuensi pertemuan, dan keahlian keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesulitan keuangan secara signifikan berhubungan dengan keahlian anggota Komite Audit, sedangkan variabel yang lain tidak memiliki hubungan yang signifikan.
2. Chen *et al.* (2009) meneliti tentang pembentukan Komite Audit secara sukarela. Penelitian ini menemukan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran dewan, Komisaris Independen, auditor Big Four, dan CEO

independen berhubungan positif secara signifikan dengan pembentukan Komite Audit. Namun, pembentukan Komite Audit berhubungan negatif dengan *fee* non-audit auditor eksternal.

3. Subamaniam *et al.* (2009) melakukan penelitian tentang pembentukan RMC yang tergabung dan RMC yang terpisah. Penelitian ini menemukan bahwa RMC cenderung berada pada perusahaan yang memiliki CEO independen dan ukuran dewan yang besar. CEO independen dan ukuran dewan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberadaan RMC. CEO independen dan ukuran dewan berhubungan positif dengan keberadaan RMC yang terpisah dan kompleksitas berhubungan negatif dengan keberadaan RMC yang terpisah.
4. Yatim (2009) meneliti tentang pembentukan RMC dengan karakteristik Komite Audit, yaitu independensi, keahlian keuangan, ukuran komite, dan ketekunan. Penelitian ini menemukan bahwa Komite Audit yang independen, mempunyai ukuran besar, dan memiliki ketekunan yang tinggi berhubungan positif dengan pembentukan RMC. Ukuran perusahaan, kompleksitas operasi organisasi, dan penggunaan KAP yang tergabung dalam *Big Four* sebagai variabel kontrol juga berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.
5. Yatim (2010) juga meneliti tentang pembentukan RMC yang dihubungkan dengan karakteristik Dewan Komisaris. Penelitian ini menemukan bahwa semakin independen, ahli, dan rajin dewan komisaris akan cenderung untuk membentuk RMC. Selain itu antara variabel kontrol ukuran

perusahaan, kompleksitas operasi organisasi, dan penggunaan KAP yang tergabung dalam *Big Four* juga berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC.

6. Andarini dan Januarti (2010) melakukan penelitian yang serupa dengan Subramaniam *et al.* (2009) dan menemukan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC

**Tabel 2.1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
Rahmat, et al. (2009)	<i>Audit Committee Characteristics in Financially Distressed and Non-distressed Companies</i>	<i>Financial Distressed</i>	Ukuran komite audit, proporsi direksi non eksekutif, frekuensi pertemuan, keahlian keuangan	Keahlian keuangan yang dimiliki anggota Komite Audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>financial distressed</i> .
Chen, et al. (2009)	<i>Audit Committees: Voluntary Formation by ASX non-Top 500</i>	Pembentukan Komite Audit secara sukarela	Leverage, ukuran perusahaan, ukuran dewan, komisaris independen, CEO independen, auditor eksternal, proporsi fee non-audit auditor eksternal, dan	Pembentukan Komite Audit secara signifikan berhubungan positif dengan leverage, ukuran perusahaan, ukuran dewan, Komisaris Independen, auditor Big Four, dan CEO independen.

			struktur kepemilikan	Namun, pembentukan Komite Audit juga berhubungan negatif dengan proporsi <i>fee</i> non-audit auditor eksternal secara signifikan.
Subramaniam, <i>et al.</i> (2009)	<i>Corporate Governance, Firm Characteristics, and Risk Management Committee Formation in Australia Company</i>	Pembentukan RMC dan tipe RMC yang dibentuk (tergabung dan terpisah dengan audit)	Karakteristik dewan, meliputi CEO duality, komisaris independen, dan ukuran dewan. Karakteristik perusahaan meliputi reputasi auditor, tipe industri, kompleksitas industry, risiko pelaporan keuangan, dan leverage	RMC banyak berada pada perusahaan dengan CEO independen dan ukuran dewan yang besar. Selanjutnya, RMC yang terpisah dari audit secara signifikan berhubungan positif dengan ukuran dewan dan risiko pelaporan, namun berhubungan negatif dengan kompleksitas perusahaan yang besar
Yatim (2009)	<i>Audit Committee Characteristics and Risk Management of Malaysian Listed Firms</i>	Pembentukan RMC	Independensi, keahlian keuangan, ukuran, ketekunan Komite Audit	Pembentukan RMC berhubungan positif dengan independensi, ukuran, dan ketekunan Komite Audit
Yatim (2010)	<i>Board Structures and</i>	Pembentukan RMC	Proporsi komisaris	Proporsi komisaris

	<i>The Establishment of a Risk Management Committee by Malaysian Listed Company</i>		independen, CEO independen, Keahlian dewan, Kerajinan dewan	independen dan CEO independen berhubungan positif dengan RMC yang berdiri sendiri. Perusahaan dengan keahlian dan kerajinan dewan yang tinggi berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC
Andarini dan Januarti (2010)	Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan terhadap Pengungkapan <i>Risk Management Committee</i> (RMC) pada Perusahaan Go Publik di Indonesia	Keberadaan RMC dan Keberadaan RMC yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri	Proporsi komisaris independen, ukuran dewan, auditor eksternal perusahaan, kompleksitas, risiko pelaporan keuangan, leverage, dan ukuran perusahaan	Ukuran perusahaan secara signifikan berhubungan positif dengan keberadaan RMC dan RMC yang terpisah dari audit.

*Sumber: review dari berbagai sumber*

### 2.3. Kerangka Pemikiran

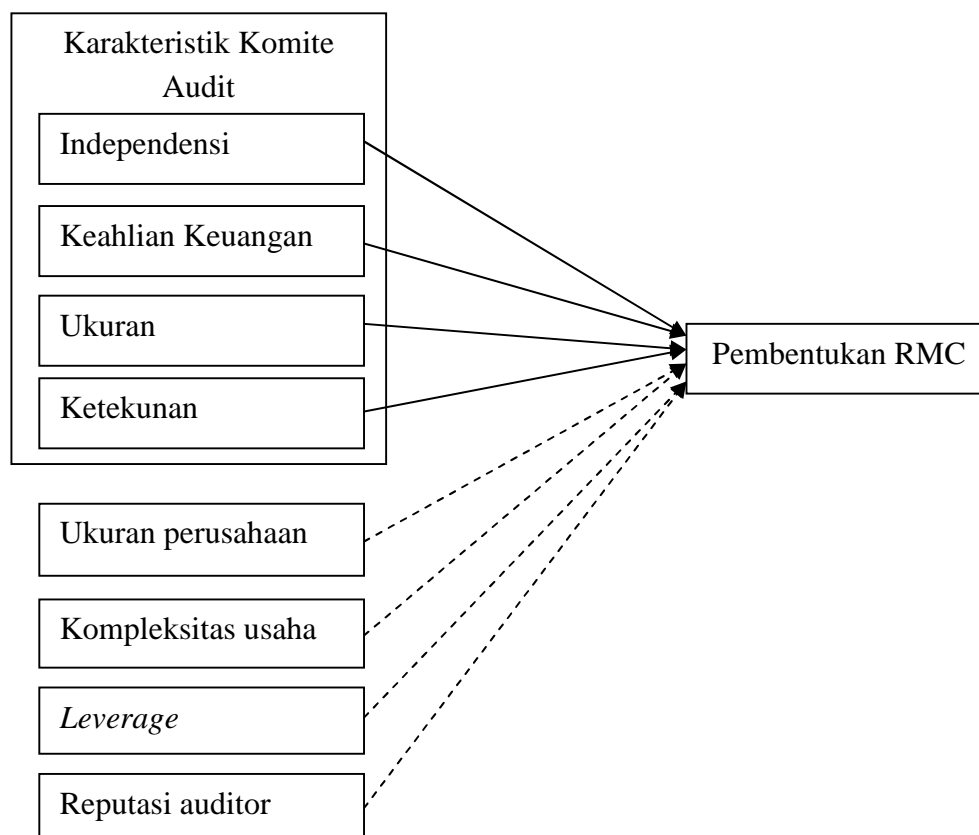
Penelitian ini menguji pengaruh karakteristik Komite Audit terhadap pembentukan RMC. Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu, variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu independensi Komite Audit, keahlian keuangan Komite Audit, ukuran Komite Audit, dan ketekunan Komite Audit.

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi pembentuksn RMC ialah ukuran perusahaan, kompleksitas usaha, *leverage*, dan reputasi auditor.

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

**Gambar 2.2**

**Model Kerangka Pemikiran**



Keterangan:

—————> = variabel bebas

-----> = variabel kontrol

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1. Independensi Komite Audit dengan Pembentukan RMC**

Syarat utama Komite Audit adalah adanya independensi dalam Komite Audit. Independensi bertujuan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit karena anggota independen dianggap mampu memberikan opini yang independen, lebih objektif dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Porter dan Gendall, 1993 dalam Rahmat *et al.*, 2008). Sehingga, Komite Audit dengan lebih banyak anggota independen akan memberikan pemantauan yang baik terhadap kebijakan-kebijakan manajemen, termasuk aktivitas pengambilan risiko. Di samping itu, anggota independen memiliki kepentingan untuk meningkatkan reputasi sebagai pemantau yang baik (Yatim, 2009). Oleh karena itu, anggota independen akan mendukung pembentukan RMC untuk membantu memaksimalkan fungsi pemantauan, terutama pada manajemen risiko. Hasil dari penelitian Yatim (2009) menegaskan bahwa independensi Komite Audit mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembentukan RMC pada perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

**H1: Independensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC**

#### **2.4.2. Keahlian Keuangan Komite Audit dengan Pembentukan RMC**

Menurut teori keagenan, untuk mengatasi konflik kepentingan pemilik dan manajemen, Komite Audit harus memiliki kemampuan yang memadai untuk meningkatkan efektivitasnya. Kemampuan tersebut dimaksudkan agar Komite Audit lebih kritis dalam menanggapi kebijakan-kebijakan manajemen. Keahlian keuangan merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh Komite Audit yang disyaratkan oleh BAPEPAM.

Komite Audit dengan anggota yang ahli di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadikan Komite Audit lebih efektif. Keberadaan personil berkeahlian akuntansi dan keuangan sebagai anggota Komite Audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam pengendalian dan pengawasan. Anggota Komite Audit dengan keahlian akuntansi dan keuangan memiliki kemampuan untuk lebih memahami permasalahan dan risiko serta prosedur yang diusulkan untuk mengatasi dan mendeteksi masalah dan risiko tersebut (DeZoort dan Salterio, 2001 dalam Yatim, 2009). Oleh karena itu, Komite Audit dengan anggota yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan, sekurang-kurangnya satu orang, diharapkan lebih terlibat aktif dalam proses manajemen risiko yaitu dengan mendukung pembentukan RMC.

Dalam penelitian Yatim (2009), keahlian keuangan Komite Audit memiliki hubungan positif terhadap pembentukan RMC walaupun tidak signifikan. Namun, dalam penelitian Yatim (2010), keahlian keuangan Dewan Komisaris memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap

pembentukan RMC. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

**H2: Keahlian keuangan Komite Audit berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.**

#### **2.4.3. Ukuran Komite Audit dengan Pembentukan RMC**

Berdasarkan teori keagenan, untuk dapat menurunkan asimetri informasi dan menjembatani kepentingan pemilik dan manajemen, Komite Audit harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perusahaan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengemban tanggung jawab pengendalian dan pengawasan aktivitas manajemen puncak. Pengetahuan dan pemahaman itu bisa didapatkan dengan saling bertukar pendapat dengan anggota yang lain. Jadi, diperlukan anggota Komite Audit yang lebih dari satu orang untuk dapat saling bertemu dan bertukar pendapat. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota Komite Audit memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda-beda. Pertukaran pengetahuan itu membuat anggota Komite Audit semakin memahami permasalahan dan risiko yang dihadapi perusahaan. Yatim (2009) membuktikan bahwa jumlah Komite Audit yang besar memiliki hubungan positif dengan peningkatan pengendalian internal melalui pembentukan RMC. Oleh karena itu, ukuran Komite yang besar akan mendukung pembentukan RMC. Hipotesis yang dapat dikembangkan ialah:

**H3: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.**

#### **2.4.4. Ketekunan Komite Audit dengan Pembentukan RMC**

Sesuai dengan teori keagenan, untuk dapat menurunkan asimetri informasi dan menjembatani kepentingan pemilik dan manajemen, Komite Audit harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perusahaan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal. Pengetahuan dan pemahaman itu bisa didapatkan dengan adanya pertemuan dan pertukaran pendapat dengan anggota yang lain. Peningkatan frekuensi pertemuan antar anggota akan meningkatkan pula pengetahuan dan pemahaman tentang perusahaan. Oleh karena itu, Komite Audit perlu mengadakan pertemuan tiga sampai empat kali dalam satu tahun (FCGI, 2002).

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa Komite Audit yang mengadakan pertemuan rutin dapat mengurangi masalah dalam pelaporan keuangan (Yatim, 2009). Pertemuan rutin memberikan kesempatan pada anggota komite untuk saling bertukar pengetahuan. Pertemuan rutin juga meningkatkan komunikasi yang baik di dalam komite dan dapat membantu perusahaan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi tingkat risiko (Tao dan Hutchinson, 2011). Leech (2005) dalam Yatim (2009) menunjukkan Komite Audit pada perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat yang melakukan pertemuan lebih sering dan mendapatkan informasi yang lebih baik tentang kondisi pengendalian internal, menunjukkan sebuah peningkatan dalam tugas pengawasan. Oleh karena itu, Komite Audit yang menunjukkan ketekunan yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan level pengawasan proses dan aktivitas

manajemen risiko. Dengan demikian, Komite Audit yang lebih tekun diharapkan mendukung pembentukan RMC. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan ialah:

**H4: Ketekunan Komite Audit berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

##### **3.1.1. Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*), variabel bebas (*independent variable*), dan variabel kontrol (*control variable*).

##### 1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang terikat dan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Melalui analisis terhadap variabel terikat adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas suatu masalah (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan variabel terikat, yaitu pembentukan RMC.

##### 2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Penelitian ini menggunakan karakteristik Komite Audit sebagai variabel bebas. Karakteristik Komite Audit yang digunakan, yaitu independensi, keahlian keuangan, ukuran, dan ketekunan Komite Audit.

##### 3. Variabel Kontrol (*Control Variable*)

Penelitian ini menggunakan empat variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, kompleksitas usaha, *leverage*, dan reputasi auditor. Faktor-

faktor tersebut merupakan faktor lain yang turut mempengaruhi pembentukan RMC, namun bukan merupakan fokus utama dari penelitian.

### **3.1.2. Definisi Operasional Variabel**

#### **3.1.2.1. *Risk Management Committee***

*Risk Management Committee* (RMC) merupakan suatu komite yang memberikan perhatian penuh pada pengawasan risiko dan tidak berbagi fokus pada pemenuhan standar akuntansi (Krus dan Orowitz, 2009). Pembentukan RMC merupakan salah satu elemen untuk mendukung tercapainya prinsip *good corporate governance* (GCG). RMC belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pembentukan RMC diukur menggunakan variabel *dummy*. Kategori 1 diberikan kepada perusahaan yang membentuk RMC, sedangkan kategori 0 diberikan kepada perusahaan yang tidak membentuk RMC.

#### **3.1.2.2. Independensi Komite Audit**

Independensi Komite Audit mengacu pada rasio anggota independen terhadap anggota total anggota. Dalam peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) dinyatakan bahwa kedudukan Komite Audit berada di bawah Dewan Komisaris dan salah seorang Komisaris Independen sekaligus menjadi ketua Komite Audit. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Syarat independensi yang digunakan di dalam penelitian ini diukur dari pengungkapan perusahaan bahwa anggota Komite Audit independen. Selain itu,

pengukuran independensi juga dapat dilihat dalam Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004, yaitu:

- a. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang member jasa audit, jasa non audit, dan atau jasa konsultasi lain kepada perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris Independen.
- b. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen.
- c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- d. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama perusahaan.
- e. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

### **3.1.2.3. Keahlian keuangan Komite Audit**

Keahlian keuangan Komite Audit diukur berdasarkan rasio anggota yang memiliki keahlian keuangan. Berdasarkan pedoman *corporate governance* FCGI (2002) mensyaratkan bahwa paling sedikit satu anggota Komite Audit harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keuangan dan akuntansi.

Dionne dan Triki (2005) mendefinisikan anggota yang berpengetahuan keuangan ialah anggota yang pada saat ini maupun sebelumnya pernah mempunyai posisi atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan keuangan, dan anggota yang mempunyai latar belakang pendidikan keuangan atau akuntansi. Pengukuran latar belakang pendidikan berdasarkan Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyebutkan bahwa minimal salah seorang anggota Komite Audit adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. Latar belakang pendidikan dapat berasal dari lulusan fakultas ekonomika dan bisnis bergelar sarjana muda, sarjana, magister, dan doctor dari universitas dalam negeri maupun luar negeri atau pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan non formal yang berkaitan dengan keahlian keuangan dan administrasi bisnis.

### **3.1.2.4. Ukuran Komite Audit**

Ukuran Komite Audit mengacu pada jumlah anggota Komite Audit yang dialokasikan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 menyatakan bahwa perusahaan *go public* wajib untuk memiliki

Komite Audit dengan jumlah minimal tiga orang. Jumlah tersebut mayoritas harus bersifat independen.

#### **3.1.2.5. Ketekunan Komite Audit**

Ketekunan Komite Audit mengacu pada seberapa banyak jumlah pertemuan yang diadakan dalam satu tahun. Artikel FCGI (2002) menyebutkan bahwa Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan. Komite Audit yang lebih sering mengadakan pertemuan cenderung untuk memberikan pandangan yang lebih efektif dan mekanisme yang baik dalam pengawasan aktivitas keuangan (Rahmat *et al.*, 2009).

#### **3.1.2.6. Ukuran Perusahaan**

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan total aset pada akhir tahun. Jumlah aset lebih menunjukkan ukuran perusahaan. Untuk mendapatkan hasil total aset yang lebih baik dan valid, maka langkah untuk mengatasinya adalah melakukan transformasi data mentah menjadi data yang merupakan nilai natural logaritma dari data itu sendiri ( $\ln$  total aset) (Yatim, 2009).

### **3.1.2.7. Kompleksitas Usaha**

Kompleksitas sebuah perusahaan dapat dilihat dari jumlah segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Organisasi dengan jumlah segmen bisnis yang besar biasanya memiliki bermacam-macam produksi, departemen-departemen atau strategi pemasaran (Subramaniam et al., 2009).

### **3.1.2.8. Leverage**

*Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh liabilitas. Dalam penelitian ini, *leverage* merupakan perbandingan total liabilitas dan total aset.

### **3.1.2.9. Reputasi Auditor**

Reputasi auditor ditunjukkan dengan apakah suatu perusahaan menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternalnya yang tergabung dalam KAP *Big Four* yang merupakan suatu kelompok KAP internasional. Dalam penelitian ini, reputasi auditor diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang tergabung dalam *Big Four* diberi nilai satu (1), dan sebaliknya diberikan nilai nol (0) (Subramaniam, et al., 2009).

### 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok individu, kejadian-kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau diselidiki. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 dan 2010. Rentang waktu pengambilan data tersebut dipilih karena masih relevan dengan tahun penelitian dan perusahaan *go public* juga semakin banyak yang menerbitkan laporan tahunan dengan dilengkapi data mengenai RMC dan profil Komite Audit.

Sampel adalah bagian dari populasi (elemen-elemen populasi) yang dinilai dapat mewakili karakteristiknya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2009 dan 2010
- b. Perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan di tahun 2009 dan 2010
- c. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah di dalam laporan keuangan dan laporannya.
- d. Terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini di tahun 2009 dan 2010.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan non finansial tahun 2009 dan 2010. Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data pembentukan RMC dalam perusahaan, independensi Komite Audit, keahlian keuangan Komite Audit, ukuran Komite Audit, ketekunan Komite Audit, ukuran perusahaan, kompleksitas usaha, *leverage* dan reputasi auditor. Sumber data yang digunakan berasal dari publikasi laporan tahunan dan laporan keuangan masing-masing perusahaan yang diperoleh di pojok BEI Universitas Diponegoro, website resmi BEI <http://www.idx.co.id>, dan website resmi perusahaan.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang dimaksud adalah data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 dan 2010.

### 3.5. Metode Analisis

#### 3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai *mean* atau rata-rata, standar deviasi, *maximum* atau nilai tertinggi pada data dan *minimum* atau nilai terendah pada data (Ghozali, 2005).

#### 3.5.2. Regresi Logistik

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi logistik. Regresi logistik tidak memerlukan uji normalitas pada variabel bebasnya (Ghozali, 2005). Penelitian ini menggunakan regresi logistik karena variabel terikatnya merupakan *dummy*, yaitu dibentuknya RMC di perusahaan atau tidak dibentuknya RMC di perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan empat variabel bebas dan empat variabel kontrol. Variabel-variabel tersebut membentuk persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$\text{RMC} = + \beta_1 \text{ACIND} + \beta_2 \text{ACEXP} + \beta_3 \text{ACSIZE} + \beta_4 \text{ACDILL} + \beta_5 \text{SIZE} + \beta_6 \text{SEGM} + \beta_7 \text{LEVR} + \beta_8 \text{BIG4} + e$$

Keterangan:

*Risk Manajemen Committee (RMC)* = Variabel *dummy* pembentukan / keberadaan RMC, dimana 1 = perusahaan yang membentuk RMC, 0 = perusahaan yang tidak membentuk RMC.

Independensi komite audit (ACIND)	=	rasio anggota independen dalam komite audit
Keahlian keuangan Komite Audit (ACEXP)	=	rasio anggota komite audit yang mempunyai keahlian keuangan dan akuntansi
Ukuran Komite Audit (ACSIZE)	=	jumlah anggota komite audit
Ketekunan Komite Audit (ACDILL)	=	jumlah pertemuan komite audit dalam satu tahun
Ukuran Perusahaan (SIZE)	=	natural logaritma dari total aset
Kompleksitas Usaha (SEGM)	=	jumlah segmen bisnis
<i>Leverage</i> (LEVR)	=	total liabilitas / total aset
Reputasi Auditor (BIG4)	=	variabel dummy reputasi auditor, dimana 1 = perusahaan yang diaudit oleh auditor Big-4, sedangkan 0 = jika sebaliknya.

= Konstanta

= Koefisien regresi

e = Kesalahan residual

Regresi logistik adalah model regresi yang sudah mengalami modifikasi, sehingga karakternya sudah tidak sesuai lagi dengan model regresi sederhana atau berganda. Oleh karena itu, penentuan signifikansi secara statistik berbeda dengan

regresi berganda. Pada model regresi logistik, terdapat kondisi yang perlu diperhatikan dari model output tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Penilaian model regresi logistik dapat dilihat dari pengujian *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. Pengujian ini dilakukan untuk menilai model yang dihipotesiskan agar data empiris cocok atau sesuai dengan model. Jika nilai probabilitas (sig.) pada uji *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, sedangkan jika nilainya lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2005).

$H_0$  : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

$H_A$ : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Dalam menilai keseluruhan model (*overall model fit*) ditunjukkan dengan *Log likelihood value* (nilai  $-LL$ ) yaitu dengan cara membandingkan antara nilai  $-2LL$  pada awal (*block number = 0*), dimana model hanya memasukkan konstanta dengan nilai  $-2LL$ , pada saat *Block Number = 1*, dimana model memasukkan konstanta dan variabel bebas. Apabila nilai  $-2LL$  *Block Number = 0* > nilai  $-2LL$  *Block Number = 1*, maka menunjukkan model regresi yang baik. Log likelihood pada regresi logistik mirip dengan

pengertian “*Sum of Square Error*” pada model regresi, sehingga penurunan log likelihood menunjukkan model yang semakin baik.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2005). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol antara satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Dalam Regresi Logistik menguji  $R^2$  menggunakan uji Cox & Snell dan Nagelkerke (Ghozali, 2005).

### 4. Tabel Klasifikasi

Tabel klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan adanya pembentukan RMC di suatu perusahaan. Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel bebas dalam hal ini yang membentuk RMC (1) dan yang tidak membentuk RMC (0), sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel bebas yang membentuk RMC (1) dan tidak membentuk RMC (0). Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100%.

## 5. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebasnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya. Menurut Ghozali (2005), jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi yang umumnya di atas 0,95, maka ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

## 6. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model terhadap pembentukan RMC. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

- a. Tingkat signifikansi ( ) yang digunakan sebesar 5% (0,05)
- b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value*. Jika *p-value* (signifikan)  $>$  , maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value*  $<$  , maka hipotesis alternatif diterima.